

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Syafa Nesya Ardelia

syafa.nesya@gmail.com

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of accountability and transparency of Village Financial Management, and society participation on public wealth. This research was done at Sumorame village, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Moreover, the instrument in data collection technique used questionnaires which were distributed directly to village officials, BPD, and society as the respondents. The research was quantitative with purposive sampling as its data collection technique. In line with that, there were 110 people as the sample with different background education, job, and position. Furthermore, the data were primary and secondary in the form of the Realization Report of APBDes. Additionally, the data analysis technique used multiple regression with SPSS 27. The research result concluded that accountability of Village Financial Management had a positive effect on public wealth. On the other hand, transparency of Village Financial Management. did not affect public wealth. In contrast, society participation had a positive effect on public wealth of Sumorame village, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Keywords: accountability, transparency, participation, public wealth

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan ke perangkat desa, BPD dan masyarakat sebagai responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 110 orang dengan latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jabatan yang berbeda. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer berupa kuisioner yang diisi secara langsung oleh responden dan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 27 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, partisipasi, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Wilayah negara Indonesia yang luas ini membutuhkan klasifikasi pada tingkat pemerintahan, sehingga pemerintahan pusat tidak mungkin mengatur seluruh wilayah negara ini. Adanya klasifikasi pada tingkat pemerintahan membutuhkan perananan akuntansi pemerintahan yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas dana masyarakat yang ditampung dan dikelola pemerintah menjadi dasar penggunaan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah. Tidak hanya

wilayah pemerintahan pusat yang melakukan akuntansi pemerintahan, tetapi pemerintah tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan juga melakukan akuntansi pemerintahan.

Saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional di negara Indonesia agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Unsur pemerataan pembangunan ini akan memberikan dampak pada kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah juga memberikan kewenangan pada desa untuk mengelola daerahnya sendiri meskipun desa menjadi bagian terkecil dalam pemerintahan, desa harus tetap mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya termasuk pengelolaan keuangan desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa desa merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dalam mewujudkan pengelolaan desa yang *good governance* pemerintah desa harus memenuhi 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan desa yang dikelola harus berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa disebut dengan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Adanya hak masyarakat desa pada keuangan desa yang diberikan pemerintah tentunya menjadi amanah yang cukup besar bagi perangkat desa sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan masyarakat desa.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk penyampaian tanggung jawab pemerintah atas kinerja pemerintah terhadap masyarakat yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan dalam menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya atau kegiatannya, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintahan atas penggunaan sumber daya terpenuhi.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi keuangan desa. Sehingga keberhasilan pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa, agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program pelaksanaan pembangunan, dan merupakan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Latif, 2014).

Dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah dan pedesaan, pemerintah Indonesia melakukan pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintahan desa sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan

masyarakat tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kesehatan, pendidikan, pendapatan atau ekonomi (Sari, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?, (2) Apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?, (3) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat?.

TINJAUAN TEORITIS

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan gambaran situasi para manajer yang lebih fokus pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi dan tidak berfokus pada tujuan individual. Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Sugista, 2017). Dalam sistem pemerintahan, pemerintah menjadi tokoh *steward* yang bertugas untuk bergerak sesuai dengan keinginan dan harapan *principal* mereka yaitu masyarakat. Maksud dari tujuan masyarakat disini adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang menjadi tujuan para *steward* guna memenuhi kepentingan sasaran organisasi pemerintahan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu upaya pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada *good governance*. Akuntabilitas (*accountability*) adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa secara administratif maupun teknik yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa akuntabel adalah suatu kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Transparansi

Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa harus diketahui oleh pihak berwenang. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*), yaitu pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2006). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa transparansi adalah suatu prinsip keterbukaan agar masyarakat mengetahui dan mendapat akses tentang informasi keuangan desa. Asas transparan merupakan asas yang terbuka terhadap hak masyarakat agar memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian seluruh kegiatan yang tergabung antara satu proses dengan proses lainnya.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah desa merupakan perwujudan *good governance*. Siregar (2020) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikut

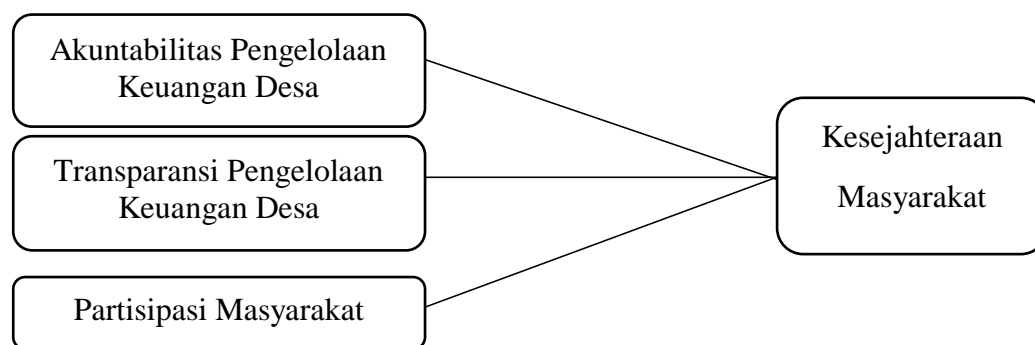
sertaan masyarakat yang diwakilkan melalui lembaga kemasyarakatan dalam proses pengelolaan keuangan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta tahap evaluasi. Tujuan adanya partisipasi masyarakat yaitu untuk melibatkan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut. Manfaat partisipasi masyarakat bagi pemerintah yaitu sebagai pondasi bagi pemerintah untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila telah tercukupinya indikator penting yang menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan yang layak, pendidikan, kesehatan, pendapatan atau ekonomi.

Rerangka Penelitian

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut gambar rerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 1
Rerangka Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dalam pengelolaan keuangan secara administratif maupun teknik dan pengelolaan sumber daya. Setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian Kuswanti (2020) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan masyarakat menyetujui akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik secara teknik maupun administratif sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₁: Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil pemerintah kepada masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan desa akan menumbuhkan pertanggungjawaban antara pemerintah desa dengan masyarakatnya, sehingga dengan transparansi tersebut akan

menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pemerintah desa akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat ikut serta dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam membiayai pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) menunjukkan hasil bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berarti pemerintah desa telah melakukan transparansi keuangan desa kepada masyarakat yang didukung dengan adanya papan informasi mengenai dana yang diperoleh dan kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₂: Transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berpusat pada kepentingan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dan terlibat dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil pencapaian pembangunan desa guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Kuswanti (2020) menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya dilakukan dengan baik serta masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan desa lebih maju.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis menduga terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

H₃: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi Objek Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel secara acak dengan pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kasual Komparatif (*Casual Comparative Research*). Metode ini digunakan untuk mengetahui atau menguji hubungan sebab akibat yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Populasi pada objek penelitian ini adalah perangkat desa, BPD dan masyarakat yang tinggal di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang dapat mewakili populasinya. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti yang mampu mewakili populasinya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* atau pemilihan sampel bertujuan, karena sampel harus memenuhi penentuan kriteria-kriteria tertentu yang digunakan dalam penelitian. Jadi jumlah sampel yang digunakan berdasarkan kriteria tertentu terdiri dari 110 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan cara membagikan kuisioner kepada responden yang termasuk dalam populasi penelitian sehingga dapat mengetahui apakah variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini juga membutuhkan data sekunder yang berguna untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan akurat. Data sekunder ini dapat diperoleh dari Pemerintahan Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo berupa Laporan Realisasi APBDes.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa secara administratif maupun teknik yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Kuswanti (2020) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu: (a) Perencanaan, (b) Pelaksanaan dan Pengawasan, (c) Tanggung Jawab. Jawaban dari responden diukur berdasarkan indikator tersebut dengan menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat. Kuswanti (2020) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi pengelolaan keuangan desa yaitu: (a) Komunikasi publik oleh pemerintah, (b) Hak masyarakat terhadap informasi. Jawaban dari responden diukur berdasarkan indikator tersebut dengan menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Partisipasi Masyarakat (PM)

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan yang berpusat pada kepentingan masyarakat. Kuswanti (2020) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat yaitu: (a) Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, (b) Keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan, (c) Keterlibatan dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil, (d) Keterlibatan dalam pengawasan dan penilaian hasil. Jawaban dari responden diukur berdasarkan indikator tersebut dengan menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Kesejahteraan Masyarakat (KM)

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila telah tercukupinya indikator penting yang menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut terdiri dari sandang, pangan dan papan yang layak, pendidikan, kesehatan, pendapatan atau ekonomi. Sari (2019) menjelaskan indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat yaitu: (a) Kesehatan, (b) Pendidikan, (c) Pendapatan atau ekonomi. Jawaban dari responden diukur berdasarkan indikator tersebut dengan menggunakan *skala likert* 1 sampai 5 poin.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner, suatu kuisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2016). Kevalidan suatu data dapat dilakukan dengan uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan yang terdapat pada kuisioner tersebut. Uji validitas dapat diukur dengan ketetapan apabila r hitung $> r$ tabel maka indikator pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid, sebaliknya apabila r hitung $\leq r$ tabel maka indikator pertanyaan tersebut dapat dikatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi hasil atau jawaban dari kuisioner yang digunakan pada waktu yang berbeda. Suatu data kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban yang diberikan seseorang mengenai pertanyaan kuisioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan alat uji statistik *Cronbach Alpha*. Sugiyono (2016) menyatakan apabila nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\leq 0,6$, maka instrumen penelitian tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi dapat dikatakan baik apabila memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara untuk menguji normalitas, yaitu uji Kolmogrov-Sminov (KS) dan uji Normal P-Plot. Ghazali (2016) menyatakan dalam uji Kolmogrov-Sminov (KS) nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal apabila nilai signifikan (Sig.) $> \alpha$ plot (0,05).

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya kedekatan antar variabel bebas. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak terjadi kedekatan antar variabel bebas. Untuk mendeteksi multikononieritas dapat dilihat dengan nilai *Tolerance* (TOL) dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) (Ghozali, 2016). Apabila dari suatu model regresi menghasilkan TOL $> 0,1$ dan VIF ≤ 10 , maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya multikolonieritas antara variabel independen dan variabel dependen yang lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya serta dugaan ketidaksamaan deviasi standar nilai pada variabel dependen di setiap variabel independennya. Pengujian ini dapat di deteksi dengan menggunakan grafik *plot* atau *scatterplot*. Ketentuan pengujian ini yaitu apabila titik-titik bersusun maka dapat dikatakan terjadi gejala heteroskedastisitas, apabila titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Berikut ini merupakan formulasi regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1APKD + \beta_2TPKD + \beta_3PM + e$$

Keterangan:

KM	: Kesejahteraan Masyarakat
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi dari masing-masing variabel bebas
APKD	: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
TPKD	: Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa
PM	: Partisipasi Masyarakat
e	: Standar Error

Uji F

Uji F adalah uji kelayakan model regresi. Uji F bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi, apakah model regresi layak diuji lebih lanjut atau tidak dengan keterangan sebagai berikut: a) Apabila nilai sign uji F $\leq 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen. b) Apabila nilai sign uji F $> 0,05$ menunjukkan bahwa variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Nilai koefisiensi pada determinasi adalah antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila variabel terikat R^2 yang diperoleh mendekati angka satu maka semakin kuat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi dependennya. Sedangkan apabila variabel terikat R^2 mendekati angka nol maka semakin lemah kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi dependennya. Hal ini menunjukkan semakin baik nilai R^2 , maka pada model regresi ini variabel independen semakin baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh pada svariabel independen terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Tingkat signifikansi yang digunakan untuk nilai t sebesar 5% (Ghozali, 2016). Kriteria dari pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: a) Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. b) Apabila nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN**Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakter responden yang berkaitan dengan pertanyaan atau pernyataan kuisisioner tentang variabel yang diteliti. Dalam kuisisioner penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang berbentuk skala likert. Hasil pengujian statistik deskriptif variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
APKD	110	6	15	12,97	1,99
TPKD	110	7	15	13	1,78
PM	110	17	35	29,75	4,53
KM	110	16	35	32,10	4,15
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD) memiliki nilai *mean* sebesar 12,97 dengan *tingkat standar deviasi* 1,99. Nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 15. Artinya responden menyetujui terhadap pertanyaan pada variabel akuntabilitas yang tersaji dalam kuisisioner penelitian. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD) memiliki nilai *mean* sebesar 13 dengan tingkat standar deviasi 1,78. Nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimum sebesar 15. Artinya responden menyetujui terhadap pertanyaan pada variabel transparansi yang tersaji dalam kuisisioner penelitian. Variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai *mean* sebesar 29,75 dengan tingkat standar deviasi 4,53. Artinya responden menyetujui terhadap pertanyaan pada variabel partisipasi masyarakat yang tersaji dalam kuisisioner penelitian. Variabel kesejahteraan masyarakat memiliki nilai *mean* sebesar 32,10 dengan tingkat standar deviasi 4,15. Artinya responden menyetujui terhadap pertanyaan pada variabel kesejahteraan masyarakat yang tersaji dalam kuisisioner penelitian.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya butir-butir pertanyaan pada kuisisioner. Berikut ini merupakan hasil dari pengujian validitas:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel $\alpha = 5\%$	Kesimpulan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (APKD)	APKD 1	0,875	0,1874	Valid
	APKD 2	0,920	0,1874	Valid
	APKD 3	0,896	0,1874	Valid
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa (TPKD)	TPKD 1	0,906	0,1874	Valid
	TPKD 2	0,929	0,1874	Valid
	TPKD 3	0,930	0,1874	Valid
Partisipasi Masyarakat (PM)	PM 1	0,723	0,1874	Valid
	PM 2	0,778	0,1874	Valid
	PM 3	0,476	0,1874	Valid
	PM 4	0,738	0,1874	Valid
	PM 5	0,720	0,1874	Valid
	PM 6	0,725	0,1874	Valid
	PM 7	0,771	0,1874	Valid
Kesejahteraan Masyarakat (KM)	KM 1	0,743	0,1874	Valid
	KM 2	0,695	0,1874	Valid
	KM 3	0,762	0,1874	Valid
	KM 4	0,738	0,1874	Valid
	KM 5	0,682	0,1874	Valid
	KM 6	0,587	0,1874	Valid
	KM 7	0,693	0,1874	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui semua pertanyaan mempunyai nilai yang valid. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kuisisioner sebanyak 110 (n). Dapat dihitung melalui rumus $n-2$ yaitu $110-2 = 108$. Nilai r_{tabel} pada derajat 108 adalah 0,1874. Semua pertanyaan pada kuisisioner tersebut memiliki $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam keseluruhan variabel dikatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil atau jawaban dari kuisisioner yang digunakan pada waktu yang berbeda. Berikut ini adalah hasil dari pengujian reliabilitas:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items	Kesimpulan
APKD	0,877	3	Reliabel
TPKD	0,910	3	Reliabel
PM	0,770	7	Reliabel
KM	0,798	7	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 semua variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Maka dapat dinyatakan pertanyaan dalam kuisioner penelitian ini reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

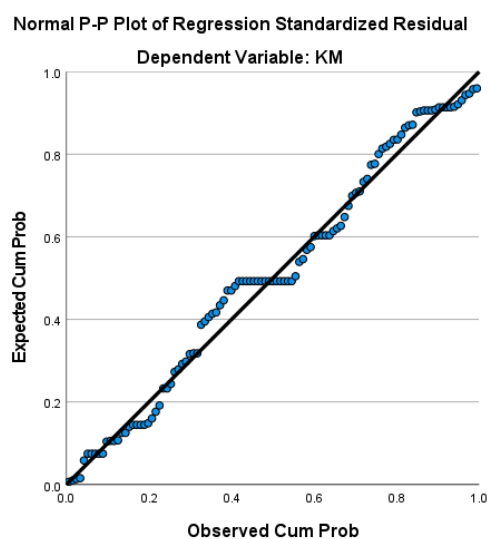
Uji normalitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		109
Normal Parameters	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.30933054
Most Extreme Differences	Absolute	0.084
	Positive	0.058
	Negative	-0.084
Test Statistic		0.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.054

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa *p-value* dari *kolmogorof smirnov* bernilai lebih dari alpha 5%, maka dapat disimpulkan residual data telah berdistribusi normal. Hal tersebut juga diperkuat melalui *normal probability plot* di bawah ini.



Gambar 2
Uji Normal P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa *normal probability plot* menunjukkan titik-titik berada di sekitar garis diagonal maka dapat diindikasikan bahwa residual data telah berdistribusi normal, sehingga model regresi tersebut dapat memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya kedekatan antar variabel bebas. Berikut ini hasil dari pengujian multikolonieritas:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolonieritas

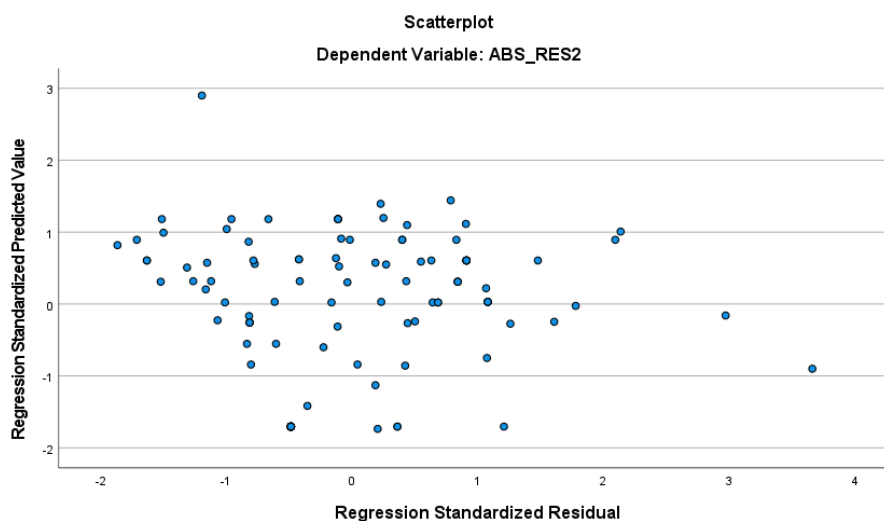
Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
PKD	0,420	2,382
TPKD	0,345	2,898
PM	0,552	1,810

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 5 di atas dapat ditunjukkan bahwa hasil uji multikolonieritas menghasilkan nilai TOL > 0,1 dan VIF ≤ 10 untuk semua variabel independen, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi kasus multikolonieritas antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas merupakan suatu alat uji yang digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya serta dugaan ketidaksamaan deviasi standar nilai pada variabel dependen di setiap variabel independennya. Pengujian ini dapat dideteksi dengan menggunakan grafik *plot* atau *scatterplot*. Berikut ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas:



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Gambar 3 di atas dapat diketahui bahwa titik titik dalam scatterplot tidak membentuk pola corong dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, sehingga dapat diidentifikasi bahwa tidak terjadi kasus heteroskedastisitas pada model regresi atau asumsi residual identik telah terpenuhi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (constant)	2,238	0,303		7,396	0,000
APKD	0,187	0,078	0,284	2,389	0,019
TPKD	-0,053	0,094	-0,074	-0,562	0,575
PM	0,419	0,093	0,469	4,528	0,000

a. Dependen Variabel: KM

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 6 hasil regresi berganda dapat diperkirakan bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1APKD + \beta_2TPKD + \beta_3PM + e$$

$$KM = 2,238 + 0,284APKD + (-0,074)TPKD + 0,469PM + e$$

Uji F

Uji F adalah alat uji yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi. Apabila nilai sign uji F < 0,05 maka hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen. Sehingga model regresi tersebut sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6,285	3	2,095	21,286	0,000 ^b
Residual	10,334	105	0,098		
Total	16,619	108			

a. Dependent Variable: KM

b. Predictors: (Constant), PM, APKD, TPKD

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 7 di atas dapat diketahui nilai sign yang diperoleh lebih kecil dari alpha 5% (nilai sign uji F < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini dikatakan layak digunakan untuk alat pengujian variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut adalah tabel hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,615 ^a	0,378	0,360	0,31372	2,013

a. Predictors: (Constant), PM, APKD, TPKD

b. Dependent Variable: KM

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Pada Tabel 8 R Square diatas menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R²) bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa, dan partisipasi masyarakat dapat menjelaskan variabel kesejahteraan masyarakat sebesar 0,378 atau 37,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam regresi tersebut.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Berikut ini merupakan tabel hasil uji hipotesis:

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		Sig
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (constant)	2,238	0,303		7,396	0,000
APKD	0,187	0,078	0,284	2,389	0,019
TPKD	-0,053	0,094	-0,074	-0,562	0,575
PM	0,419	0,093	0,469	4,528	0,000

b. Dependen Variabel: KM

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji t, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut: variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan nilai koefisien B sebesar 0,187 dan nilai signifikansi sebesar $0,019 \leq 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis pertama diterima. Variabel transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan nilai koefisien B sebesar -0,053 dan nilai signifikansi sebesar $0,575 > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis kedua ditolak. Variabel partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan nilai koefisien B sebesar 0,419 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka, hipotesis ketiga diterima.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai koefisien B sebesar 0,187 dan signifikansi bernilai $0,019 \leq 0,05$ dapat diartikan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sumorame, sehingga

hipotesis diterima. Penelitian ini memberikan hasil bahwa semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Hasil pada penelitian ini menerangkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pertanggungjawaban yang diukur dengan penyajian laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipublikasikan dengan banner yang dipasang didepan kantor kelurahan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemerintah desa telah mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan keuangan desa dan masyarakat mendapatkan timbal balik hasil dari pengelolaan keuangan desa yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden yang banyak menyatakan sangat setuju dan setuju.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), Sari (2019), Novitasari (2019), Kuswanti (2020) yang menyimpulkan bahwa adanya penyajian pelaporan keuangan yang akuntabel atau jelas dan rinci dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Sehingga pengaruh positif akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat diketahui bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dengan nilai koefisien B sebesar $-0,053$ dan signifikansi bernilai $0,575 > 0,05$ dapat diartikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh dengan arah negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sumorame, sehingga hipotesis ditolak.

Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dikarenakan masyarakat kurang memiliki kesadaran akan arti pentingnya transparansi bagi kesejahteraan masyarakat sehingga transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti digunakan untuk mencapai suatu tujuan formalitas tertentu atau atas dasar menerapkan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jawaban responden yang mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju, itu menandakan bahwa masyarakat mengakui bahwa transparansi laporan keuangan desa sudah berjalan transparan namun hal tersebut tidak ada pengaruhnya dalam kesejahteraan masyarakat.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah melakukan tindakan transparansi atas dasar peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga searah dengan Making (2021) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh positif pada pengelolaan dana desa, karena masyarakat kurang peduli dan kurang meminat membaca akan pentingnya transparansi pengelolaan dana desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dengan nilai koefisien B sebesar $0,419$ dan signifikansi bernilai $0,000 \leq 0,05$ dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sumorame, sehingga hipotesis diterima. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Partisipasi masyarakat untuk perencanaan pembangunan desa pada Desa Sumorame dapat dikatakan baik, hal ini dibuktikan dengan banyaknya responden yang menjawab sangat

setuju dan setuju. Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lombogia et al. (2018), Kuswanti (2020) yang menyimpulkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan hingga pengawasan dilaksanakan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat untuk menguji hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa dan pemerintah di atasnya berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). (2) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel transparansi pengelolaan keuangan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat kurang memiliki kesadaran akan arti pentingnya transparansi bagi kesejahteraan masyarakat sehingga transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti digunakan untuk mencapai suatu tujuan formalitas tertentu atau atas dasar menerapkan peraturan yang berlaku. (3) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk pengelolaan keuangan desa pada Desa Sumorame dikatakan baik. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan

Peneliti mendapatkan keterbatasan penelitian sebagai berikut: (1) Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyebaran kuisioner, banyak masyarakat yang kurang paham tentang pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kuisioner. (2) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa atau satu tempat penelitian dan penelitian ini hanya menggunakan jawaban responden tanpa didukung dengan wawancara. (3) Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi pengelolaan keuangan desa dan partisipasi masyarakat. Sedangkan masih banyak variabel lain yang bisa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagi pemerintah desa Sumorame, hendaknya pemerintah desa Sumorame lebih mengupayakan atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memiliki kesadaran arti pentingnya transparansi bagi kesejahteraan masyarakat. (2) Bagi masyarakat desa Sumorame, hendaknya membangun kesadaran untuk lebih peduli dan lebih berpartisipasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga masyarakat mengetahui perkembangan desa dan pemerintah desa juga mengetahui aspirasi masyarakat, dengan itu maka pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat memberikan temuan empiris baru. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator lain serta mampu berinovasi dengan kuisioner dalam penelitiannya sesuai dengan kondisi penelitian yang diperlukan, sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih rinci dan lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kurniawan, T. H. 2019. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(2): 1-19.
- Kuswanti, Afida P.E. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Latif, Abdul. 2014. Peran Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Posigadan. Madani. *Jurnal Pengabdian Ilmiah*. 4(1): 95-111.
- Lombogia, R., J.M. Ruru, dan N.N. Plangiten. 2018. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan di Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik* 4(50): 1-13.
- Making, A.A.L. 2021. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 10(10): 1-15.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1): 1-17.
- Novitasari. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(9):1-16.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 8 Mei 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Sari, A. N. 2018. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 7(5):1-15.
- Sari, Mandy Tania. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(12):1-17.
- Siregar, M. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi* 4(2): 59-73.
- Sugista, R. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Wardani, D.K. 2020. Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis*. 23(1): 35-50.